

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintahan di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi pemerintahan tersebut, baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk memberikan informasi yang dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada publik (Heni Sundari, dkk, 2019).

Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu komponen yang penting dalam menciptakan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Lembaga-lembaga publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi (Hani Siti Hanifah dkk, 2019)

Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna jika informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015).

Untuk membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas perlu dimilikinya pegawai negeri sipil yang berkompeten yang memiliki karakteristik dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, profesional dan efektif (Sudarmanto, 2015).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat memahami bagaimana proses serta pelaksanaan akuntansi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Heni Sundari, dkk, 2019).

Dalam era globalisasi saat ini, masalah kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi sorotan maupun tumpuan bagi suatu perusahaan maupun instansi pemerintah. Sumber Daya Manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Walaupun banyak sarana dan prasarana serta sumber daya alam, tanpa dukungan sumber daya manusia kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik (Dahlia, 2017).

Keberhasilan sebuah organisasi atau instansi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja didalamnya, disamping itu informasi juga merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi sebuah organisasi dalam setiap transaksi, proses kegiatan mampu berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan informasi yang baik. (Khotimatus Sa'adah dkk, 2017).

Sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan, SDM sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan

keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri (Fidyah Yuli Ernawati dkk, 2019).

Kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dibidang pengelola keuangan (Fidyah Yuli Ernawati dkk, 2019).

Pemahaman akuntansi merupakan orang yang mengerti proses akuntansi dari awal sampai dengan menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan (Rizki Mardiana, 2017).

Tingkat kualitas suatu laporan keuangan dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam perusahaan itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh perusahaan dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten (Fidyah Yuli Ernawati dkk, 2019).

Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal

tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Fidyah Yuli Ernawati dkk, 2019).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). (Rusvianto, dkk. 2018).

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Renny Novsellia Sihite, Holiawati, 2017).

Setiap tahun, semua laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu berarti bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Namun lain halnya ketika BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini WDP tersebut akan

diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan (Hani Siti Hanifah dkk, 2019).

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu mengenai, berdasarkan laporan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat kembali gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan kinerja BPK, RSUD lembang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Seperti diketahui, kasus korupsi dana BPJS senilai Rp7,7 miliar di RSUD Lembang menjadi perhatian khusus BPK saat menyambangi instansi tersebut (Ayi Kusmawan, 2019).

Mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna akan mengevaluasi para pejabat di masing-masing SKPD. Sejak berdirinya Kabupaten Bandung Barat 11 tahun silam, hingga kini Bandung Barat hanya mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Umbara menyatakan, untuk meraih opini WTP tersebut, Pemkab Bandung Barat sudah berkonsultasi dengan BPK RI. Terutama terkait apa saja yang menjadi kekurangan dan harus dipersiapkan untuk bisa meraih WTP tersebut. “Kita punya mimpi besar Bandung Barat ingin meraih WTP. Karena sudah 11 tahun ini Bandung Barat hanya

mendapat *disclaimer* dan WDP saja. Harapannya di tahun ke-12 ini Bandung Barat bisa meraih WTP,” kata Aa Umbara di Ngamprah, baru-baru ini. Dia menambahkan, meraih opini WTP dari BPK RI tahun ini merupakan target wajib kepemimpinan pasangan Akur. Sehingga, diharapkan seluruh SKPD di KBB, untuk bisa mengejar dan mempersiapkan diri dengan kinerja dan kekompakan serta kerja maksimal untuk mencapai target tersebut. (Ragam Daerah, 2019).

Selain fenomena tersebut adanya pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan/bagian keuangan di pemerintah kabupaten Bandung Barat tidak hanya pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi namun dengan latar Pendidikan yang berbeda beda. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah latar belakang pendidikan yang berbeda dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangannya. Serta masih terdapat pegawai-pegawai yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga masih perlu dibenahi untuk masalah tersebut. (Kepala Inspektorat Pemerintah KBB, Yadi Azhar, 2020).

Kemudian selain perbedaan Pendidikan adanya permasalahan yakni terkait kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan Undang – Undang. (Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KBB, Sandhira, 2020).

Menilai dari tahun 2018 yang lalu, Opini WDP yang disandang KBB jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih memiliki masalah keuangan. Pandangan kami dari organisasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cabang KBB melihat adanya beragam permasalahan khususnya terkait pengelolaan asset. Maka, harus ada percepatan langkah dari Pemerintah KBB yang mengurus

kejelasan aset, terutama dalam penyelesaian sertifikasi serta pencatatanya yang masih sangat banyak persoalan. Termasuk, aset lahan yang saat ini masih bersengketa (Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, 2019).

Masalah yang mempengaruhi opini yaitu dari Aset Tetap, diikuti masalah lainnya yaitu pendapatan dan belanja. Masalah pada akun aset yaitu tidak didukung dengan rincian aset yang memadai sehingga keberadaan fisiknya sulit untuk dapat ditelusuri, faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat, seperti belum komprehensifnya kerangka kebijakan, persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah, inefisiensi, keterbatasan data dan keterbatasan SDM yang berkompeten (Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, 2019).

Beberapa persoalan yang sering muncul yaitu pencatatan aset yang belum lengkap dan akurat, aset tidak didukung dengan data yang handal yang mudah ditemukan, proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, aset belum dioptimalkan kebermanfaatannya, *Standard Operating Prosedur (SOP)* yang belum disusun secara valid dan reliabilitas, aset berupa tanah yang belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya (Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, 2019).

Seperti diketahui, menjelang 10 tahun usianya, Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat. Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya

berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung (Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maman Sunjaya, 2017).

Hal tersebut yang menjadi kendala Pemda KBB untuk meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yakni masalah aset tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja. Maka, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai, membuat aset selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, 2019).

Dengan kondisi itu, Pemkab agar meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya. “Juga memiliki pemahaman terhadap peraturan, sehingga akan ada kepatuhan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian internal juga perlu diperhatikan (Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maman Sunjaya, 2017).

Dari beberapa kelemahan sistem pengendalian internal tersebut jelas terbukti bahwa hal hal tersebut sudah melanggar Peraturan Pemerintah/Peraturan dalam Undang-Undang, yakni pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah serta pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Penjelasan-penjelasan diatas tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Winwin Yadiati (2017), *The Human Resources*

Competence influence the Financial Reporting Quality. The financial reporting quality will be better if the administrative apparatus involved in the process of preparing the financial statements has good knowledge, adequate skills, rational and responsible attitude, and sufficient experience. “Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan. Kualitas pelaporan keuangan akan lebih baik jika aparat administrasi yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan memiliki pengetahuan yang baik, keterampilan yang memadai, sikap rasional dan bertanggung jawab, dan pengalaman yang cukup”.

Serta sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono Umar, Sidin Usman dan Rahima Br. Purba (2018) yang mengatakan, *Internal controls have positive and significant impact on the village fund management. Well performed internal control system will result in better the village fund management.*

“Kontrol internal berdampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Apabila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang lebih baik”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Bandung Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut:

1. Hasil opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Adanya pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah latar belakang pendidikan yang berbeda dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangannya.
3. Adanya permasalahan terkait kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan Undang-Undang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal, terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil.

Menurut Sugiyono (2011:3):

“Sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini kegunaan akademik:

1.5.1 Kegunaan Akademik

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Bagi pembaca memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Batasan Masalah Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian ini tercapai. Batasan masalah ini juga digunakan karena adanya *pandemic COVID-19* yang melanda di hampir seluruh negara di dunia begitupun tak terlewatkan negara kita tercinta Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal di rumah selama *pandemic COVID-19* berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan sampai saat ini. Hal tersebut menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Oleh karena itu, berikut beberapa batasan masalah:

1. Penelitian tidak dilakukan secara langsung ke lapangan, melainkan penelitian dilakukan secara *online*.
2. Responden dari penelitian ini hanya berjumlah 25 orang.